KONSEP NEGARA HUKUM PANCASILA

RAUF AR RASYID MAULIN

2010003600186

A. PENDAHULUAN

Sejak perjuangan kemerdekaan melawan penjajahan, cita-cita bangsa Indonesia adalah membangun sebuah Negara Hukum. Cita-cita Negara Hukum tersebut tidak bisa dipisahkan dari perkembangan UUD Negara Indonesia. Hal ini dapat diketahui dengan dicantumkannya konsep Negara Hukum di dalam tiap-tiap UUD dan Konstitusi yang pernah dan sedang berlaku. Cita-cita Negara hukum di Indonesia mulai dari UUD 1945, Konstitusi RIS Tahun 1949, UUDS RI Tahun 1950, dan yang terakhir diatur di dalam UUD 1945 amandemen.

Meskipun konsep Negara Hukum di Indonesia merupakan cita-cita bangsa Indonesia dan juga telah diatur dalam setiap UUD dan Konstitusi namun Konsep Negara Hukum itu sendiri bukanlah asli dari bangsa Indonesia. Konsep Negara Hukum merupakan produk yang di impor atau suatu bangunan yang dipaksakan dari luar (*imposed from outside*) yang diadopsi dan ditransplantasi lewat politik konkordansi colonial Belanda. Meskipun Konsep Negara Hukum merupakan adopsi dan transplantasi dari Negara lain, namun konsep Negara Hukum Indonesia berbeda dengan konsep Negara Hukum bangsa lain. Negara Hukum Indonesia lahir bukan sebagai reaksi dari kaum liberalis terhadap pemerintah absolute, melainkan atas keinginan bangsa Indonesia untuk membina kehidupan Negara dan masyarakat yang lebih baik guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan, menurut cara-cara yang telah disepakati. Hal ini disebabkan karena latar belakang social budaya bangsa Indonesia yang berbeda dengan bangsa lain.

Bangsa Indonesia dalam pembentukan Negara hukumnya didasarkan pada cita-cita hukum Pancasila. Menurut Mochtar Kusumaatmadja tujuan hukum berdasarkan Pancasila adalah "Untuk memberikan pengayoman kepada manusia, yakni melindungi manusia secara pasif (negatif) dengan mencegah tindakan sewenang-wenang, dan secara aktif (positif) dengan menciptakan kondisi kemasyarakatan berlangsung secara wajar sehingga secara adil tiap manusia memperoleh kesempatan secara luas dan sama untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya secara utuh".

Mengenai konsep Negara Hukum yang didasarkan pada Pancasila, Hasan Zaini mengemukakan pendapat bahwa :

"Dasar Negara Hukum menurut Pancasila antara lain dilandasi oleh pengakuan adanya hukum Tuhan, hukum kodrat, dan hukum etis. Lain daripada itu dapat disusun kedudukan dan hubungan tiga macam hukum antara satu dengan yang lain dan terhadap Negara serta hukum positif di dalam satu rangka".

Guna mewujudkan cita-cita Negara Hukum Pancasila tersebut maka dalam kehidupan dalam Negara Hukum Pancasila haruslah diatur dalam UUD. UUD dan Negara Hukum merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Suatu UUD adalah jaminan utama untuk melindungi warga Negara dari perlakuan yang sewenang-wenang. Dengan demikian timbul konsep Negara konstitusional (*the constitutional state*), dimana UUD dianggap sebagai institusi yang paling efektif untuk melindungi warganya melalui konsep *rule of law* atau *rechtsstaat*.

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa dengan mempelajari UUD suatu Negara, maka dapat dipahami sejarah perjuangan suatu bangsa dalam tekadnya mewujudkan cita-cita luhur tokoh-tokoh bangsa atau para pendiri bangsa (*the founding fathers*). Cita-cita Negara hukum oleh

para pendiri bangsa (*the founding fathers*) Indonesia telah disusun dalam suatu konstitusi yang disebut dengan UUD 1945. Awal atau permulaan dari pengaturan Negara Hukum di Indonesia adalah UUD 1945. Pengaturan yang menyebutkan Indonesia sebagai negara hukum tidak diatur secara eksplisit dalam batang tubuh UUD 1945 melainkan diatur dalam penjelasan UUD 1945. Pemberlakuan UUD 1945 ini tidak berlangsung lama karena adanya agensi militer Belanda. Dengan adanya agensi militer ini dan penahanan terhadap para pemimpin Indonesia oleh Belanda menjadi perhatian PBB. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, PBB membentuk konferensi antara Indonesia dengan Belanda, yang dikenal dengan Konferensi Meja Bundar (KMB). Dalam konferensi tersebut menghasilkan 3 persetujuan yaitu : (1) Pembentukan Negara RIS, (2) Menyerahkan Kedaulatan Kepada RIS, dan (3) Pembentukan uni antara RIS dengan kerajaan Belanda.

Dengan adanya persetujuan mengenai pembentukan Negara RIS, maka secara otomatis Negara Indonesia harus membuat UUD baru untuk menggantikan UUD 1945 dan hasilnya UUD 1945 di ganti dengan konstitusi RIS 1949.

Dengan melihat uraian tersebut dapat diketahui bahwa pengaturan mengenai Negara Hukum sebagaimana diamanatkan dalam UUD telah menimbulkan ambiguitas dan kesimpang siuran pengertian tentang konsep Negara hukum yang dianut oleh Indonesia. Sehingga inilah latar belakang yang dipilih dalam masalah Negara hukum Indonesia yang diteliti oleh penulis.

B. PEMBAHASAN

Rumusan Pancasila secara imperatif harus dilaksanakan oleh rakyat Indonesia dalam kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Setiap Sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang integral, yang saling mengendalikan dan saling mengunci. Ketuhanan dijunjung tinggi dalam

kehidupan bernegara, tetapi diletakkan dalam konteks Negara kekeluargaan yang egaliter, yang mengatasi paham perseorangan dan golongan, selaras dengan visi kemanusiaan yang adil dan beradap, persatuan kebangsaan, demokrasi permusyawaratan yang menekankan consensus, serta keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia'

Oemar Senoadji mengatakan bahwa Negara Hukum Indonesia memiliki cirri-ciri khas Indonesia. Pancasila harus diangkat sebagai dasar dari sebuah Negara dan sumber hukum di Indonesia, maka Negara hukum Indonesia dapat pula dinamakan Negara Hukum Pancasila. Salah satu ciri pokok dalam Negara Hukum Pancasila adalah adanya jaminan terhadap *freedom of religion* atau kebebasan beragama. Tetapi, kebebasan beragama di Negara Hukum Pancasila selalu dalam konotasi yang positif, artinya tiada tempat bagi atheisme atau propaganda anti agama di bumi Indonesia. Hal ini sangat berbeda dengan misalnya Amerika Serikat yang memahami konsep Freedom of religion baik dalam arti positif maupun dalam arti negatif, sebagaimana dirumuskan oleh sir Alfred denning yang dikutip oleh Senoadji.

Muhammad Tahir Azhari, menelaah Negara Hukum Pancasila dengan bertitik pangkal dari asas kekeluargaan maka yang tercantum dalam UUD Negara RI Tahun 1945. Dalam asas kekeluargaan maka yang diutamakan adalah "rakyat banyak, namun harkat dan martabat manusia tetap dihargai". Pasal 33 UUD Negara RI Tahun 1945 mencerminkan secara khas asas kekeluargaan ini. Dalam pasal ini ada suatu penjelasan bahwa yang penting ialah kemakmuran masyarakat, dan bukan kemakmuran orang orang seorang, namun orang seorang berusaha sejauh tidak mengenai hajat hidup orang banyak. Konsep Negara Hukum Pancasila harus dilihat dari sudut asas kekeluargaan itu, untuk dapat memahami bagaimana Konsep Negara Hukum Pancasila, perlu ditelaah bagaimana pengertian negara dan pengertian hukum dilihat dari sudut asas kekeluargaan itu. Padmo Wahyono memahami hukum adalah sesuatu alat atau wahana

untuk menyelenggarakan kehidupan Negara atau ketertiban dan menyelenggarakan ketertiban social.

C. PENUTUP

Kedudukan Pancasila dalam pohon ilmu hukum diibaratkan sebagai dasar dan fondasinya; Serat-serat pokok ilmu seperti Sosiologi, Politik, Budaya, Antropologi, Ekonomi dan Psikologi sebagai batangnya serta dapat digunakan relasi ilmu bantu untuk membahas/mengkaji hukum dan ini berguna untuk memperkaya dan melengkapi pengkajian terhadap hukum (muncul cabang studi hukum baru yang diberi nomenklatur sosiologi hukum, politik hukum, bahasa hukum,dst); Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Adat, Hukum Internasional dan sebagainya sebagai cabang dan rantingnya; serta kebijakan dan implementasi sebagai daunnya. Oleh karena itu, Pancasila sebagai staatsfundamentaln norms atau pokok-pokok kaidah negara yang fundamental mengharuskan Pancasila hidup dalam realita, bukan hanya dalam cita. Tidak hanya retorika atau verbalisme tetapi dalam setiap aksi dan tindakan dan juga mengukuhkan posisinya sebagai dasar falsafah negara, mengembangkannya ke dalam wacana ilmiah, mengupayakan konsistensinya dengan produk perundang-undangan, menjaga koherensi antar sila, berkorespondensi dengan realitas sosial, dan menjadikannya sebagai karya, kebanggaan, serta komitmen bersama sehingga ia tidak hanya berperan sebagai pemersatu dan perekat jiwa kebangsaan, tetapi juga sebagai falsafah bangsa. Namun yang perlu diingat adalah bahwa Pancasila bukanlah dasar yang statis, melainkan merupakan pedoman yang dinamis sehingga Pancasila dioperasionalkan dan diaktualisasikan supaya responsif terhadap dinamika perkembangan zaman. Artinya Pancasila senantiasa terbuka bagi proses dan penafsiran baru dengan syarat memerhatikan semangat dasar yang terkandung di dalamnya serta keterkaitan antarsila. Dengan demikian Pancasila harus menjadi ruh yang melandasi pembentukan hukum

nasional dan setiap tindakan penyelenggaraan negara dan masyarakat sehingga prinsip ketuhanan yang sarat nuansa moral menjadi pondasi inti yang menyinari sila kemanusiaan, sila persatuan, sila Kerakyatan, dan sila keadilan sosial sehingga terwujud negara kesejahteraan yang religius (religious welfare state) sebagaimana dicita-citakan oleh para pendiri negara (the founding fathers)

DAFTAR PUSTAKA

Bambang Arumanadi dan Sunarto, *Konsepsi Negara Hukum menurut UUD 1945*, IKIP Semarang Press, Semarang, 1990, hal. 106.

Bambang Arumanadi dan Sunarto, *Loc Cit*, hal. 46-47.

Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah Penelitian Tentang Fondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal. 190.

I Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi (Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Pembukaan UUD 1945)*, Edisi Revisi, Setara Press, Malang, 2010, hal. 71.

Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hal. 171.

Muhammad Tahir Azhari, 2015, *Negara Hukum (suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini)*. Predana Media Group, Jakarta: hal. 93 *Ibid*, hal. 94-95

Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi, Menguatnya Model Legitimasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta 2010, hal. 114. *Ibid*, hal. 89

Satjipto Rahardjo, *Loc Cit*, hal. 81.

Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum yang membahagiakan rakyatnya*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hal. VII.